

Human Costs dalam Pembangunan Pariwisata Super Premium di Labuan Bajo

(Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger)

Felix Riondi Sugar^{1*}, Petrus Canelio Aprilian², Champideli Armanoba Jalni³, Yosef Kurniawan Lagur⁴, Alfeus Alfian Nenat⁵, Melkior Kopong Kapuka⁶, Romanus Jumardi⁷, Lusianus Fernando Roy Wujon⁸, Melkior Budiman Ngambut⁹, Fransisco G. N. Nggajo¹⁰

¹⁻¹⁰ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: feliksugar@gmail.com

Abstract. *The development of super premium tourism in Labuan Bajo is one of the Indonesian government's strategic policies aimed at enhancing national tourism competitiveness, attracting investment, and promoting local economic growth. Nevertheless, behind these achievements, various issues have emerged, including social inequality, agrarian conflicts, the marginalization of local communities, and threats to the sustainability of local culture. This study aims to analyze the development of super premium tourism in Labuan Bajo through Peter L. Berger's political ethics of development perspective. The study employs a descriptive qualitative method using a literature review approach based on books, scientific journals, research findings, and other relevant documents. The analysis applies Berger's concepts of calculus of pain, calculus of meaning, and demythologization as ethical frameworks for evaluating development policies. The findings indicate that the development of super premium tourism in Labuan Bajo has not fully reflected the principles of equitable development, as it continues to generate various human costs, including material suffering, unequal access to development benefits, and the erosion of local cultural values. Therefore, tourism development should not be assessed solely by economic growth but also by social justice, community participation, and cultural preservation. This study contributes conceptually by introducing Peter L. Berger's political ethics of development as a critical framework for evaluating tourism development policies in Indonesia.*

Keywords: *Community Participation; Development Ethics; Human Costs; Labuan Bajo; Super Premium Tourism.*

Abstrak. Pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan daya saing pariwisata nasional, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, di balik keberhasilan pembangunan tersebut, muncul berbagai persoalan berupa ketimpangan sosial, konflik agraria, marginalisasi masyarakat lokal, serta ancaman terhadap keberlangsungan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo melalui perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan menggunakan konsep *calculus of pain*, *calculus of meaning*, dan *demythologization* yang dikembangkan Berger sebagai instrumen untuk menilai dimensi etis pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembangunan yang berkeadilan karena masih menghasilkan berbagai biaya-biaya manusia (*human costs*), baik dalam bentuk penderitaan material, ketimpangan akses terhadap manfaat pembangunan, maupun terkikisnya nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pelestarian budaya. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menghadirkan perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger sebagai kerangka kritis dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan pariwisata di Indonesia.

Kata Kunci: Biaya Manusia; Etika Pembangunan; Labuan Bajo; Pariwisata Super Premium; Partisipasi Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pada masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama para menteri pada Senin, 15 Juli 2019 untuk membahas program prioritas pemerintah. Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah rencana pengembangan destinasi pariwisata super prioritas di beberapa wilayah Indonesia. Hasil rapat menetapkan lima kawasan wisata yang akan dikembangkan, salah satunya adalah Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan kawasan wisata unggulan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Selain itu, program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah melihat bahwa kekayaan alam dan budaya Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pembangunan destinasi wisata prioritas diharapkan mampu mendukung perkembangan UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki infrastruktur di wilayah terkait (Kamenparekraf, 2024). Pandangan lain disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata unggulan merupakan langkah strategis. Hal ini didasarkan pada peran sektor pariwisata sebagai salah satu sumber utama peningkatan devisa negara serta daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia (Sakti, 2019). Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Joko Widodo menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Keputusan ini juga didukung oleh popularitas Labuan Bajo di tingkat internasional, terutama karena keberadaan satwa purba Komodo serta keindahan alam bawah lautnya. Dengan daya tarik tersebut, Labuan Bajo telah memiliki citra yang kuat sehingga upaya promosi tidak perlu dilakukan secara besar-besaran.

Pemerintah beranggapan bahwa peningkatan status Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata eksklusif akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Melalui pembangunan tersebut, pemerintah meyakini bahwa perubahan, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih luas. Gagasan bahwa pembangunan mampu menciptakan kesejahteraan telah menjadi pandangan yang berkembang selama dua dekade terakhir. Di banyak negara berkembang, pembangunan bahkan dipandang sebagai harapan baru untuk mendorong perubahan sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan Masyarakat (Kristeva, 2015). Akibatnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia terus berupaya mencapai kesejahteraan melalui peningkatan pembangunan di berbagai sektor,

termasuk yang terjadi di Labuan Bajo. Dalam proses mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, masyarakat tradisional sering kali diarahkan untuk beradaptasi dan mengalami perubahan menuju pola kehidupan yang lebih modern (Aditya Krisnadi, 2023). Namun, pada kenyataannya pembangunan tidak selalu memberikan manfaat yang sama bagi seluruh masyarakat. Dalam banyak kasus, pembangunan dapat menjadi ruang bagi kepentingan politik dan ekonomi yang justru memicu ketimpangan, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, serta hilangnya nilai-nilai budaya lokal. Hal inilah yang menunjukkan adanya dilema dalam pembangunan, karena di satu sisi pembangunan diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif yang perlu dikritisi dan diawasi (Dale, 2013).

Harapan terhadap kesejahteraan yang dibawa oleh konsep pembangunan mendapat kritik dari Peter L. Berger, seorang sosiolog dan filsuf asal Amerika Serikat. Dalam bukunya *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*, Berger menyoroti pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga melalui perspektif etika politik yang berangkat dari pengalaman penderitaan manusia. Ia melihat bahwa berbagai proyek pembangunan sering kali memiliki konsekuensi sosial yang besar karena harus dibayar dengan pengorbanan manusia (Berger, 1982). Karena itu, Berger menolak pandangan yang hanya berfokus pada harapan kesejahteraan di masa depan dengan mengabaikan penderitaan masyarakat pada saat ini. Ia mempertanyakan urgensi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga karena menurutnya masalah utama yang harus segera ditangani adalah penderitaan nyata yang dialami masyarakat. Bagi Berger, upaya mengatasi persoalan kemanusiaan saat ini lebih penting daripada mengejar pembangunan yang belum tentu menjamin kesejahteraan di masa mendatang.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, sebagian besar masih berfokus pada aspek dampak sosial-ekonomi, pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan destinasi (Kiwang & Arif, 2020). Hingga kini, masih sangat terbatas kajian yang menganalisis pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo melalui perspektif etika politik pembangunan Peter L. Berger, khususnya dengan menggunakan konsep *calculus of pain*, *calculus of meaning*, dan *demythologization* untuk mengkaji biaya-biaya manusia (*human costs*) yang ditimbulkan oleh pembangunan. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini, yaitu menawarkan analisis kritis terhadap pembangunan pariwisata super premium dengan menempatkan dimensi etika, keadilan sosial, penderitaan masyarakat, dan pelestarian makna budaya sebagai fokus utama, bukan semata-mata pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menjadi urgen mengingat

pembangunan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas terus dipercepat, sementara berbagai persoalan seperti ketimpangan manfaat ekonomi, konflik agraria, marginalisasi masyarakat lokal, serta ancaman terhadap keberlangsungan budaya lokal masih terus mengemuka. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian etika pembangunan sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi perumusan kebijakan pariwisata yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni dengan cara mengakses dan mempelajari tema-tema yang relevan dengan tema tulisan ini dan menarik benang merah dengan persoalan yang diangkat. Penulis menggali tema-tema tersebut dari berbagai literatur ilmiah baik di jurnal, buku, penelitian, maupun berita di internet. Kemudian, informasi-informasi yang ada (sehubungan dengan pandangan etika politik pembangunan Peter L. Berger) digunakan sebagai basis agumentasi penulis dalam menguliti dan membedah persoalan pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo.

3. PEMBAHASAN

Prolegomena Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger

Peter Ludwig Berger lahir pada 17 Maret 1929 di Vienna, Austria namun ia dibesarkan di Kota Wina. Setelah Perang Dunia II berakhir, tepatnya pada tahun 1946 Berger bermigrasi dan mulai menetap di Amerika Serikat (Berger, 1971). Berkat berbagai karya yang telah diterbitkannya, Berger kemudian dikenal sebagai seorang Sosiolog Amerika paling berpengaruh di abad ke-20 (Noor, 2011). Pada tahun 1949, Berger meraih gelar *Bachelor of Arts* (BA) dari Wagner College. Kemudian, Berger melanjutkan studinya di *New School for Social Research* di New York dan memperoleh gelar M.A pada 1950 dan Ph.D pada 1952. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Berger sempat bekerja di beberapa perguruan tinggi, antara lain; *Evangelische Akademie* di Bad Boll Jerman (1954-1955). Berger juga pernah menjabat sebagai profesor muda di *University North Carolina* (1956-1958), *New School for Social Research*, *University of Rutgers*, dan *Boston College*. Kemudian, sejak tahun 1981 Berger menjadi profesor sosiologi dan teologi di *University of Boston* dan menjadi direktur dari Institut Studi Kebudayaan, Agama, dan Masalah Dunia (Nasu, 2023). Adapun karya-karya Berger yang sangat memengaruhi corak pemikiran sosial, politik, kebudayaan, dan agama antara lain; *Vitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (1963), *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1966), *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological*

Theory of Religion (1967), *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural* (1970), *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics Social Change* (1974), *The Capitalist Revolution* (1986), *Homeless Mind: Modernization and Consciousness* (1974) (Nasu, 2023).

Ketertarikan Berger terhadap isu-isu pembangunan yang terjadi di Dunia Ketiga berangkat dari pengalamannya mengunjungi beberapa negara berkembang. Pada tahun 1969, misalnya, Berger berkesempatan untuk melakukan perjalanan ke Kepulauan Karibia, Venezuela dan Meksiko. Dalam salah satu kesempatan dari kunjungan tersebut, Berger bertemu dengan Ivan Illich, seorang Pastor Katolik sekaligus filsuf kontemporer. Dalam pertemuan tersebut, Berger mendiskusikan berbagai hal dengan Illich, terutama seputar isu-isu pembangunan yang terjadi di Meksiko. Berger mengakui bahwa perbincangan yang terjadi dengan Illich telah menghantar dirinya untuk menggeluti masalah-masalah pembangunan di Dunia Ketiga. Berger berkata; “*Sejak itu sampai sakarang, masalah-masalah pembangunan Dunia Ketiga beralih ke dalam pusat kegiatan keahlian saya...*” (Berger, 1982). Karena alasan itulah, Berger kemudian banyak melakukan perjalanan ke negara-negara Dunia Ketiga, khususnya di benua Amerika dan Afrika.

Dalam merumuskan konsep etika politik pembangunan, Berger menyodorkan dua macam “kalkulus” untuk melihat apakah sebuah pembangunan telah membawa dampak positif bagi semua warga negara secara merata. Perhitungan ini ialah perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) dan perhitungan makna (*calculus of meaning*) (Nasu, 2023). Pada bagian berikutnya, penulis akan menghadirkan secara sederhana penjelasan kedua kriteria tersebut, sekaligus gugatannya terhadap paham kapitalisme dan sosialisme.

Pertama, perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) merujuk kepada kebijaksanaan politik yang mesti mempertimbangkan berbagai penderitaan fisik yang dapat diakibatkan oleh pembangunan misalnya kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, dan penindasan kepada masyarakat akibat pembangunan (Berger, 1982). Di sini, Berger sangat menekankan perihal kerugian-kerugian material dan fisik yang dapat dialami oleh manusia karena pembangunan. Oleh karena itu, Berger sangat menekankan agar setiap kebijakan politik mesti memperhitungkan segala bentuk penderitaan yang dapat dialami oleh manusia, sekaligus ia menolak segala bentuk pengorbanan manusia, khususnya masyarakat yang miskin dan lemah, demi mewujudkan cita-cita pembangunan. *Kedua*, perhitungan makna (*calculus of meaning*) merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan, dan peradaban yang mereka miliki. Di sini, Berger menolak

pembangunan karena efek dari pembangunan selalu berpotensi menggeser, menggantikan, atau bahkan menghilangkan kekayaan sosiokultural masyarakat yang sudah ada lebih dahulu.

Kedua “kalkulus” yang dirumuskan oleh Berger ini terlihat sangat ketat, terutama bagi kelompok-kelompok pemodal yang diinspirasi oleh paham kapitalisme dan sosialisme. Menurut Berger, paham kapitalisme dan sosialisme yang masif berkembang di negara-negara Dunia Ketiga telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat kecil. Kelompok-kelompok kapitalis datang dengan mitos pertumbuhan bagi semua warga negara, namun untuk menciptakan pertumbuhan tersebut, dibutuhkan pengorbanan oleh beberapa kelompok (baca: masyarakat miskin dan lemah). Kelompok kapitalis membangun kepercayaan bahwa dalam jangka pendek sebagian orang – terutama mereka yang miskin dan lemah – mesti berkorban dan akan menderita, namun dalam jangka panjang berkat pengorbanan dan penderitaan itu semua kelompok akan merasakan pertumbuhan ekonomi yang sama. Sedangkan, kelompok sosialis datang dengan mitos revolusi dengan membawa janji-janji emosional. Mitos revolusi membangkitkan harapan akan penyelamatan dari keadaan yang menyedihkan dan anomali sekarang ini, dan bayangan akan suatu masa depan yang akan melahirkan komunitas sejati yang ditandai oleh solidaritas (Berger, 1982).

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi satu kesatuan, sekalipun pengertiannya berbeda (Ibrahim, 2017). Dalam *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial* (1974), Berger mengakui bahwa pembangunan akan selalu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi disaat yang bersamaan Berger meragukan dan mempertanyakan pertumbuhan tersebut. Menurut Berger, tidak ada jaminan tentang mitos pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat umum di masa depan. Malahan Berger mendapati bahwa pertumbuhan tersebut hanya akan dinikmati oleh kelompok-kelompok pemodal dan penguasa saja. Sedangkan, keyakinan bahwa masyarakat kecil akan mendapat “tetesan-tetesan” dari meja para pemodal hanyalah ilusi yang dibangun demi kelancaran proyek pembangunan semata. Selain itu dalam penelitiannya, Berger menemukan fakta lain bahwa terdapat lebih banyak kelaparan dan penyakit sekarang ini dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, selain itu jumlah pengangguran dan setengah pengangguran telah meningkat (Berger, 1982). Dari fakta ini jelas bahwa proyek pembangunan yang dilatarbelakangi oleh ideologi apapun tidak mampu menyelesaikan persoalan praksis manusia – terutama bagi masyarakat yang kecil dan lemah – malah sebaliknya memperburuk keadaan yang sedang dialami. Oleh karena itu, menurut Berger masalah bagi negara Dunia Ketiga bukanlah bahwa mereka kekurangan sumber daya, kecapan teknologi, pranata-pranata moden, atau pun ciri-ciri kebudayaan yang dapat merangsang pembangunan, melainkan bahwa mereka sedang

mengalami penghisapan oleh sistem kapitalis dan oleh agen-agen imperialis, baik asing maupun di dalam negeri (Berger, 1982).

Atas semua pertimbangan di atas, Berger mengusulkan pendekatan lain yang berguna bagi pembangunan, baik dari sudut teoritis maupun dari sudut politis. Pendekatan tersebut ialah pendekatan demitologisasi. Pendekatan demitologisasi akan menuntut agar semua fakta dihadapi dan semua biaya diperhitungkan (Berger, 1982). Artinya, fakta kemiskinan dan persoalan praksis masyarakat mesti diselesaikan terlebih dahulu dan solusi atas penyelesaian hal-hal praksis tersebut mesti memperhatikan biaya-biaya manusiawi yang dapat diakibatkan oleh pembangunan.

Pendekatan demitologisasi berlaku bagi segala jenis mitos yang melatarbelakangi suatu pembangunan, baik itu kapitalisme atau sosialisme. Menurut Berger, mitos pertumbuhan ataupun revolusi mesti dibongkar kepalsuannya (baca: demitologisasi). Sehingga, muncul cara pandang baru dalam setiap pengambilan kebijakan politik. Oleh karena itu, Berger sebenarnya ingin mengingatkan bahwa yang terpenting bukanlah model pembangunan mana yang paling tepat, melainkan bagaimana pembangunan dapat dan harus menghilangkan penderitaan (Sutopo, 2013). Berger hendak mengusulkan bahwa pembangunan seharusnya menyertakan nilai-nilai etis, yakni biaya-biaya manusia (*human costs*), baik berupa fisik (*calculus of pain*) maupun makna (*calculus of meaning*).

Dampak Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo Bagi Masyarakat Lokal

Labuan Bajo telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang menarik perhatian dunia. Daya tarik kawasan ini berasal dari keberadaan satwa purba Komodo, keindahan ekosistem bawah laut, serta gugusan pulau-pulau kecil yang memiliki panorama eksotis. Berbagai potensi tersebut menjadikan Labuan Bajo semakin diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan pun terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan laporan Kompas, sepanjang tahun 2023 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo mencapai 423.847 orang (Taris & Prasetya, 2024). Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi banyak pihak, tetapi tidak bagi kelompok masyarakat kecil di Labuan Bajo.

Pada 2019 sebuah penelitian pernah dilakukan guna memperoleh informasi tentang respon masyarakat Labuan Bajo terhadap pembangunan pariwisata di daerah tersebut (Kiwang & Arif, 2020). Hasilnya ditemukan dampak-dampak negatif yang mulai dirasakan oleh masyarakat setempat, misalnya kenyamanan masyarakat yang terganggu oleh keramaian kegiatan pariwisata di sana, sehingga lahan-lahan privat mulai hilang. Hal ini wajar mengingat industri hiburan mulai tumbuh menggeliat dengan ditandai peningkatan jumlah hotel, restoran,

kafe, dan bar yang menyediakan pesta musik. Selain itu, masyarakat mulai merasakan perubahan gaya hidup seperti cara berpakaian, penggunaan bahasa, dan mulai hilangnya budaya-budaya lokal (Kiwang & Arif, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa lajunya pembangunan pariwisata di Labuan Bajo tidak membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal di sana, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Walau dalam sosialisasinya, pemerintah dan pengusaha telah menyatakan janji-janji kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat luas dari efek pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo, nyatanya masih jauh panggang dari api. Ketimbang merasakan manisnya buah pembangunan yang dijanjikan pemerintah dan investor, masyarakat malah dirugikan dengan berbagai kebijakan politik yang dibuat pemerintah demi menjamin kelancaran proyek pembangunan di Labuan Bajo. Berbagai pembangunan fasilitas dan infrastruktur serta kemudahan perizinan investasi bagi para pengusaha berdampak pada peningkatan jumlah usaha dan proyek di Labuan Bajo, tetapi keuntungan itu semua mesti dibayar dengan pengorbanan dari masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan keadilan-keadilan pembangunan.

Di balik hinga-bingar Labuan Bajo yang tiap hari digenjot aspek pembangunannya, terdapat masalah-masalah manusiawi yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek pariwisata eksklusif di sana. Salah satu organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), yakni Jatam secara tegas mengungkapkan bahwa prospek pembangunan pariwisata Labuan Bajo tidak didesain untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Koordinator Jatam, Melky Nahar mengatakan bahwa warga masyarakat Pulau Komodo misalnya, sejak pemerintah menetapkan Pulau Komodo sebagai wilayah konservasi, warga telah direlokasi ke tempat lain, dilarang berburu dan bertani, akibatnya banyak masyarakat yang mesti beralih profesi menjadi nelayan. Tak sampai di situ, sebagian wilayah laut yang masuk wilayah konservasi otomatis diikat oleh aturan-aturan yang sama berlaku di daratan. Bedanya, kali ini masyarakat dipaksa untuk beralih profesi pekerjaan ke sektor hilir pariwisata seperti menjadi karyawan hotel atau pemandu wisata (DA, 2022).

Dalam kasus lain, jurang kesenjangan kepemilikan agraria pun semakin melebar. Para pengusaha dengan mudah merogoh kocek untuk menguasai lokasi-lokasi strategis di Labuan Bajo. Sementara itu, masyarakat lokal sebagai pemegang hak atas tanah mesti berjuang mempertahankan properti mereka di tengah himpitan ekonomi dan kebijakan politik pembangunan. Akibatnya, di beberapa tempat di Labuan Bajo kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan telah berpindah tangan ke para investor. Hal ini berimbas pada fenomena privatisasi ruang publik yang mulai marak terjadi di Labuan Bajo. Belum lagi muncul oknum-oknum mafia tanah yang setiap saat menjadi ancaman bagi masyarakat lokal yang mempunyai

tanah. Oknum-oknum mafia tanah tersebut lahir tak terkendali sejalan dengan naiknya harga tanah dan bangunan di Labuan Bajo. Mereka mengincar tanah-tanah milik masyarakat lokal yang belum memiliki sertifikat kepemilikan (Bagung, 2022).

Selain itu, masalah lain yang ditimbulkan akibat pembangunan pariwisata eksklusif Labuan Bajo adalah seputar tenaga kerja. Perlu diakui bahwa sumber daya manusia masyarakat lokal masih tergolong rendah. Ketatnya persaingan dunia kerja membuat banyak masyarakat lokal kalah bersaing, sehingga banyak lapangan-lapangan pekerjaan di bidang industri pariwisata mesti didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini semakin diperparah dengan jargon Pariwisata Eksklusif yang otomatis juga menuntut kemampuan “eksklusif” dari para pekerjanya.

Realitas ini telah melahirkan penderitaan baru bagi masyarakat lokal di Labuan Bajo. Pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo bukannya memecahkan masalah paksis (baca: kemiskinan dan penderitaan) yang dihadapi masyarakat lokal di sana, malah sebaliknya menambah beban penderitaan baru yang mesti dipikul oleh masyarakat. Atau, bila meminjam kata-kata dari Arturo Escobar katanya; “Pembangunan adalah pencetus masalah bukan hanya ketika ia gagal membangun, tetapi juga ketika ia sukses membangun” (Pinem, 2020). Dengan demikian, kebijakan pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo dapat dinilai kurang tepat dan bijaksana.

Pariwisata Eksklusif Labuan Bajo di Hadapan Etika Politik Pembangunan Berger

Kekayaan sumber daya alam dan budaya yang melimpah di Labuan Bajo, ditambah dengan potensi pasar domestik dan internasional yang signifikan, membuat pemerintah Indonesia dihadapkan dengan persoalan bagaimana menggunakan semua aset yang ada agar lebih bermanfaat bagi semua warga negara. Masalahnya, orientasi kebijakan politik pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah masih bersifat jangka pendek, misalnya merubah Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata eksklusif. Pemerintah mencita-citakan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, namun dengan cara yang instan. Pemerintah lebih tertarik menandatangani proposal pembangunan yang dapat menambah devisa negara secara cepat dan langsung. Sedangkan, persoalan praksis warga negara yakni penderitaan akibat kemiskinan tidak mendapat perhatian lebih dari negara. Akibatnya, dalam berbagai upaya pembangunan yang sudah dibuat telah menimbulkan ketimpangan pendistribusian manfaat yang merata untuk seluruh warga masyarakat (Koerniawati, 2022).

Bila melihat polemik di atas, kebijakan politik yang pemerintah buat tentu jauh dari pandangan etis politik pembangunan yang Berger rumuskan. Oleh karena itu, pada bagian

selanjutnya penulis akan menghadapi proyek pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo di hadapan pandangan etika politik pembangunan yang ditawarkan oleh Berger.

Pertama, perhitungan penderitaan (*calculus of pain*). Perhitungan penderitaan di sini berarti merujuk kepada kebijaksanaan kebijakan politik pembangunan yang diambil pemerintah, dengan memperhatikan kerugian-kerugian manusiawi yang dapat diakibatkan. Dengan demikian, bila menilai kebijakan pemerintah pusat untuk merubah pariwisata di Labuan Bajo dari pariwisata berorientasi komunitas dan berkelanjutan menjadi pariwisata berbasis privatisasi dan monopoli telah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat lokal di sana. Hal ini dikarenakan pendapatan utama masyarakat lokal Labuan Bajo datang dari belanja wisatawan kelas menengah ke bawah. Keeksklusifan Labuan Bajo pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat kecil (baca: UMKM) karena ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan minat wisatawan kelas atas. Selain itu, UMKM yang dikelola masyarakat akan kalah bersaing dengan lapak usaha para pemodal besar. Bila hal ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan semakin banyak orang Labuan Bajo yang terpaksa kehilangan sumber utamanya mencari nafkah. Selain itu, proyek pembangunan di Labuan Bajo nihil partisipasi masyarakat lokal (Agraria, 2022). Keterlibatan masyarakat lokal – sekalipun ada – tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap nasib mereka, malahan banyak dari masyarakat yang mesti menjadi penonton dalam proyek pembangunan ini. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo mestinya lebih memperhitungkan biaya-biaya penderitaan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan pariwisata eksklusif tersebut.

Kedua, perhitungan makna (*calculus of meaning*). Orientasi pembangunan pariwisata di sebuah daerah cenderung mengedepankan nilai komersil dan keuntungan ekonomis (Purwohandoyo & Cemporaningsih, 2018). Konsekuensi dari orientasi pembangunan ini ialah terancamnya kelestarian budaya dan ciri sosial masyarakat setempat. Atau, mengutip pernyataan Adishakti bahwa pembangunan selalu menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak terkendali sehingga mengancam kelestarian kebudayaan (Istianingsih, 2024). Dengan demikian, perhitungan makna yang Berger tawarkan – berarti juga kekayaan budaya dan adatistiadat suku Manggarai – mestinya menjadi perhatian utama pemerintah dalam merumuskan proyek pariwisata eksklusif di Labuan Bajo. Jangan sampai ambisi negara untuk memperoleh profit sebesar-besarnya lewat pariwisata mesti mengorbankan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Ketiga, pendekatan demitologisasi. Ketimbang membangun pariwisata eksklusif di Labuan Bajo dengan dalih memperkaya negara dan menyejahterakan masyarakat, pemerintah mestinya dapat terlebih dahulu menyelesaikan masalah-masalah praksis yang dialami

masyarakat Manggarai di Labuan Bajo, demikian pendekatan demitologisasi berkerja. Artinya, negara mesti menjamin terlebih dahulu menciptakan kesejahteraan rakyatnya sebelum memikirkan hal-hal yang lain. Apalagi bila kebijakan pemerintah tersebut malah menambah beban penderitaan yang mesti dipikul rakyatnya. Atau, meminjam pernyataan Aristoteles: tujuan berdirinya sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin warga negara (Suhelmi, 2001). Tentu pendekatan demitologisasi yang ditawarkan oleh Berger menuntut keberanian dari pemerintah untuk mengangkat ke permukaan segala persoalan praksis yang dihadapi masyarakat, kemudian pemerintah mesti menawarkan jalan keluar yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. KESIMPULAN

Realitas pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo telah menghadirkan beragam polemik dan masalah baru di tengah masyarakat. Sebagian kelompok menyambut dengan antusias proyek pembangunan tersebut, namun di lain pihak ada kelompok masyarakat kecil yang mesti dirugikan oleh pembangunan tersebut. Hal ini wajar mengingat ideologi pembangunan yang dianut dalam negara-negara Dunia Ketiga sering kali mencita-citakan kesejahteraan di masa depan sambil mengorbankan kepentingan-kepentingan kelompok kecil dan yang paling rentan dalam masyarakat.

Dari hasil kajian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketimbang menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo, alangkah lebih bijaksana kalau pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan praksis yang dihadapi masyarakat kecil. Apalagi dalam prakteknya, pembangunan tidak saja menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kerugian-kerugian baru bagi masyarakat. Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa kerugian material maupun kerugian akibat hilangnya tradisi dan kebudayaan lokal yang telah dihidupi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan kerugian-kerugian tadi. Hal ini sesuai dengan kriteria pembangunan etis yang ditawarkan oleh Berger yakni perihal perhitungan penderitaan dan perhitungan makna. Selain itu, pendekatan demitologisasi – yakni dengan menyingkapkan segala bentuk penderitaan yang dialami masyarakat – dapat lebih efektif menyelesaikan persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat.

Akhirnya, pemerintah mesti lebih bijaksana menentukan keputusan politik yang diambil, termasuk dalam pembangunan. Pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo memang baik, namun ada hal yang lebih urgen untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh

pemerintah. Jangan sampai, demi cita-cita kesejahteraan di masa depan, penderitaan masa kini dijamin.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya Krisnadi, L. (2023). Kritik Boaventura de Sousa Santos terhadap Ideologi Pembangunan: Sebuah Epistemicide. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 337–346.
- Agraria, K. N. P. (2022). Pernyataan Sikap: Hentikan Perampasan Tanah dan Represifitas Dengan Alasan Pembangunan Pariwisata Premium Labuan Bajo. Retrieved March 31, 2024, from Indonesia For Global Justice website: <https://igj.or.id/2022/08/05/pernyataan-sikap-hentikan-perampasan-tanah-dan-represifitas-dengan-alasan-pembangunan-pariwisata-premium-labuan-bajo>
- Bagung, A. D. D. (2022). Potret Buram Pembangunan Pariwisata Super Premium Di Labuan Bajo. Retrieved April 29, 2024, from The Columnist website: <https://thecolumnist.id/artikel/potret-buram-pembangunan-pariwisata-super-premium-di-labuan-bajo-2190>
- Berger, P. L. (1971). *A Rumor of Angels: Modern Society and Rediscovery of The Supernatural*. USA: Pelican Books.
- Berger, P. L. (1982). *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Depok: LP3ES.
- DA, A. T. (2022). Jatam: Desain Pariwisata Labuan Bajo Tidak Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal.
- Dale, C. J. P. (2013). *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik*. Labuan Bajo: Sunspirit.
- Ibrahim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40(50), 6305–6328.
- Istianingsih, N. (2024). Manajemen dan Konservasi Warisan Budaya. In P. P. Juniarta (Ed.), *Warisan Budaya sebagai Kekayaan Pariwisata* (p. 45). Bandung: Intelektual Manifest Media.
- Kamenparekraf. (2024). Alasan Menparekraf Fokus Kembangkan 5 Destinasi Super Prioritas. Retrieved March 15, 2024, from Kamenparekraf website: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Alasan-Menparekraf-Fokus-Kembangkan-5-Destinasi-Super-Prioritas>
- Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2020). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i2.7290>
- Koerniawati, F. T. (2022). Destinasi wisata, sumber daya manusia pariwisata dan pariwisata berkelanjutan. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(1), 39–50.
- Kristeva, N. S. S. (2015). *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasu, K. B. (2023). Kritik Peter L. Berger Terhadap Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme dan Konsekuensinya Bagi Pemahaman Yang Realistis Tentang Pembangunan. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

- Noor, I. (2011). *Agama sebagai Universum Simbolik*. Yogyakarta: Pustaka Prisma.
- Pinem, M. L. (2020). Kritik Terhadap Epistemologi Barat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 122–129. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27984>
- Purwohandoyo, J., & Cemporaningsih, E. (2018). *Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sakti, N. W. (2019, December). Perkaya Suguhan, Dulang Wisatawan. *Media Keuangan: Tranparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, XIV(147), 5.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutopo, O. R. (2013). Biaya-Biaya Manusia dalam Era Neoliberal. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(Sosiologi), 1–18.
- Taris, N., & Prasetya, A. W. (2024). 423.847 Turis Kunjungi Labuan Bajo Tahun 2023, Turis Asing Terbanyak. Retrieved April 29, 2024, from Kompas.com website: <https://travel.kompas.com/read/2024/01/13/130100127/423.847-turis-kunjungi-labuan-bajo-tahun-2023-turis-asing-terbanyak>